

Judul : Program Nametag Tak Penting, Vaksinasi Juga Banyak Masalah
Tanggal : Minggu, 18 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Komisi IV Soroti Kebijakan PKH Kementan **Program Nametag Tak Penting, Vaksinasi Juga Banyak Masalah**

Ketua Komisi IV DPR Sudin menyoroti tingginya serangan virus yang menyerang hewan ternak. Namun, program vaksinasi pada hewan yang dilakukan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan) justru diduga bermasalah.

SUDIN menegaskan, Komisi IV DPR telah memberikan dukungan terhadap setiap upaya peningkatan produksi pangan danantisipasi serangan penyakit terhadap hewan ternak. Hal itu melalui pembelian vaksin untuk memperkecil hewan ternak dari serangan virus.

"Itu kalau beli vaksinnya benar. Ini kan PKH juga banyak masalah pengadaan vaksin ini," kata Sudin.

Sudin sejak September 2022 telah memperingatkan adanya dugaan persoalan pengadaan vaksin untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Ketua DPD PDIP Lampung ini juga menyoroti program yang digagas PKH Kementan untuk tahun 2024, yang tidak memberi dampak pada upaya peningkatan populasi hewan ternak.

Salah satunya, pengadaan 'nametag' pada hewan ternak untuk pendataan populasi hewan ternak.

"Nametag ini tidak diperlukan juga kok. Kita lihat hari ini. Jadi, tidak ada korelasi anggaran dengan produksi," katanya.

Sementara, anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema menekankan pentingnya penambahan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian penyakit yang menyerang hewan ternak terutama *zoonosis*.

"Jadi rabies, *African Swine Fever* (ASF/Demam Babi Afrika) dan seterusnya," kata pria yang akrab disapa Ansi ini.

Berikutnya, sambung dia, terkait asuransi usaha ternak yang oleh Ditjen PKH Kementan di-

pendanaan hewan ternak atau *nametag* yang terlalu besar namun tidak terlalu penting.

"Kami dengar ada anggaran untuk penandaan ternak sapi yang konon kabarnya satu ekor itu Rp 20 ribu. Semacam nametag untuk konteks NTT itu 30 ribu (sapi). Kami kalkulasi Rp 20 ribu kali 30 ribu (sapi), anggarannya sekitar 600 jutaan. Apakah mungkin itu bisa dikoversikan?" ujarnya.

Selain itu, Ansi juga meminta agar Ditjen PKH Kementan mengubah *mindset*-nya bahwa program yang dicanangkan tidak hanya sebatas pada pengadaan ternak. Bangun perspektif bahwa kesehatan hewan ini penting.

"Jadi bukan terus menerus kita pengadaan ternak, tetapi vaksin, vitaminnya, dokter hewannya, ini menurut saya perlu kita perhatikan," tambahnya.

Sementara, anggota Komisi IV DPR Alien Mus mengingatkan Ditjen PKH Kementan untuk mengawasi penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang sapi. Penyakit ini memiliki tingkat kematian tinggi pada anak sapi sementara jika menyerang sapi dewasa sudah tidak pantas untuk dikonsumsi.

"Apalagi kita beberapa hari ini akan menghadapi Hari Raya (Idul Adha). Tentu orang mau berkorban tapi pastinya hewan yang sehat. Saya harap ini jadi atensi," ujarnya.

Dirjen PKH Kementan Nasrullah menegaskan, Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit

